

PENGENAAN UPAYA *DISGORGEMENT* KEPADA DIREKSI DIKAITKAN DENGAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

Nama : Muhammad Difa Dzaky Raihan

Jurusan/Program Studi: Hukum/ Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Marlina Br Purba

Heru Saputra Lumban Gaol, M.H.

ABSTRAK

Pasar Modal merupakan suatu sarana penghimpun dana untuk skala yang lebih luas, Pasar Modal sendiri diharapkan menjadi salah satu fundamental ekonomi bagi suatu negara. Semakin membesarnya hal tersebut menyebabkan pelaku pasar modal yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Seperti pada kasus PT. Magnus Capital, PT. Sinergi Millenium sekuritas, hingga PT. Jouska Finansial Indonesia yang sempat hangat di media massa. Sehingga di tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal atau yang biasa disebut *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund*. Pengaturan ini diharapkan menjadi perlindungan bagi investor di bidang pasar modal. Direksi selaku pemegang peranan penting dalam setiap tindakan Perseroan dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang diterima perseroan baik untuk pemegang saham dalam perseroan maupun pihak ketiga. Asas *Piercing The Corporate Veil* mengiyakan akan adanya pertanggungjawaban secara pribadi dari pemilik saham maupun organ perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan perseroan. Hal ini menimbulkan argumentasi apakah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah ini dapat dikenakan kepada diri Direksi selaku organ perseroan dengan menggunakan asas *Piercing The Corporate Veil* yang nantinya akan dijawab dari penjelasan di dalam jurnal ini.

Kata kunci : Pasar Modal, Keuntungan tidak sah, Direksi, *Piercing The Corporate Veil*

THE IMPOSITION OF DISGORGEMENT EFFORTS ON THE BOARD OF DIRECTORS IS RELATED TO THE PRINCIPLE OF PIERCING THE CORPORATE VEIL

Name : Muhammad Difa Dzaky Raihan

Dicipline/Study Programme: Hukum/Ilmu Hukum

Contributor : Dr. Marlina Br Purba

Heru Saputra Lumban Gaol, M.H.

ABSTRAK

The Capital Market is a means of raising funds on a larger scale, and it is expected to be a fundamental aspect of a country's economy. The increasing magnitude of this has led to irresponsible capital market participants engaging in actions prohibited by the law to unauthorised profits. Examples include cases involving companies like PT. Magnus Capital, PT. Sinergi Millenium Sekuritas, and PT. Jouska Finansial Indonesia, which gained attention in the mass media. Consequently, in 2020, the Financial Services Authority (OJK) enacted Regulation No. 65/POJK.04/2020 concerning the Return of unauthorised profits and Compensation Funds for Investor Losses in the Capital Market, commonly known as Disgorgement and Disgorgement Fund. This regulation is expected to serve as protection for investors in the capital market. The Board of Directors, as crucial actors in every corporate action, is deemed responsible for all losses incurred by the company, both for shareholders and third parties. The principle of Piercing The Corporate Veil affirms the possibility of personal accountability for shareholders or corporate organs proven to have committed violations that harm the company. This raises the argument of whether the Return of unauthorised profits can be applied to the Directors as corporate organs using the Piercing The Corporate Veil principle, which will be addressed in the explanations within this journal.

Keywords : Capital Market, unauthorised profits, Board of Directors, Piercing The Corporate Veil